

Supersemar dan Stabilitas Politik: Analisis Transformasi Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto Berdasarkan Perspektif Samuel P. Huntington

Defa Akhdan Naufal¹

¹Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted November 29, 2024

Available online 8 December, 2024

Keywords:

Supersemar, stabilitas politik, Huntington, Orde Lama, Orde Baru

Keywords:

Supersemar, political stability, Huntington, Old Order, New Order



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

highlights Huntington's theory's relevance in understanding the tension between stability and political participation in developing nations.

ABSTRAK

Supersemar, sebagai peristiwa historis, menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, membawa implikasi besar terhadap stabilitas politik Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika transformasi kekuasaan berdasarkan teori stabilitas politik Samuel P. Huntington, yang menekankan pentingnya institusi yang kuat untuk mengakomodasi perubahan sosial. Ditemukan bahwa langkah-langkah Soeharto, seperti pembubaran PKI dan restrukturisasi politik, menciptakan stabilitas sementara melalui dominasi militer namun membatasi partisipasi masyarakat, yang mengarah pada krisis legitimasi jangka panjang. Pengalaman Indonesia menunjukkan relevansi teori Huntington dalam memahami ketegangan antara stabilitas dan partisipasi politik di negara berkembang.

ABSTRACT

Supersemar, as a historical event, marked the transition of power from President Soekarno to Soeharto, with profound implications for Indonesia's political stability. This study examines the dynamics of power transformation using Samuel P. Huntington's theory of political stability, emphasizing the necessity of robust institutions to accommodate societal changes. It finds that Soeharto's measures, such as the dissolution of PKI and political restructuring, created temporary stability through military dominance but restricted public participation, leading to a long-term legitimacy crisis. Indonesia's experience

PENDAHULUAN

Masa kepemimpinan Orde Lama, atau dapat dikenal juga dengan masa kepemimpinan sang Proklamator kemerdekaan Indonesia, yakni Presiden Ir. Soekarno dan Moh. Hatta telah usai / berakhir pada tahun 1966 seiring dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret yang juga dikenal dengan "Supersemar" yang kemudian dikeluarkan karena timbulnya ketidakstabilan negara yang pada saat itu terjadi karena adanya peristiwa G30S PKI yang dianggap telah mengguncang Indonesia dan masuk kedalam salah satu urutan teratas peristiwa - peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia.

Surat perintah yang kemudian secara dasar berisi tentang instruksi presiden (yang pada saat itu dijabat oleh Ir. Soekarno) untuk memberikan kekuasaannya kepada aktor militer untuk menjaga keamanan yang pada saat itu di bawah jabatan Letjen Soeharto, diyakini telah menghasilkan hal - hal yang tidak sesuai dengan rencana atau dengan kata lain, telah terjadi hal - hal yang tidak diantisipasi / tidak diinginkan dengan dikeluarkannya supersemar.

Ditinjau secara kronologis, awalnya, dengan ketidakstabilan negara yang tercipta dari banyak aksi demonstrasi dari perkumpulan mahasiswa / akademisi yang dikenal juga dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat. Aksi Tritura ini kemudian berisikan beberapa tuntutan - tuntutan seperti pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), perombakan kabinet Dwikora karena dianggap banyak diisi oleh PKI, dan juga penurunan harga, khususnya harga bahan - bahan pangan.

Karena mencuatnya demonstrasi - demonstrasi dalam skala yang cukup besar di Indonesia, Letjen Soeharto yang pada saat itu berposisi sebagai orang yang bertanggungjawab atas keamanan nasional dengan jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkomkamtib), mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menjalankan tindakan - tindakan bersifat tegas yang harus dilakukan untuk mengatasi kerusuhan - kerusuhan yang sedang dialami Indonesia pada periode ini, yakni Supersemar.

*Corresponding Author

Email: defa21001@mail.unpad.ac.id

Soeharto, selaku pemegang kekuasaan yang cukup tinggi setelah diadakannya Supersemar kemudian langsung menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan PKI dalam kurun waktu yang sangat singkat setelah keluarnya Supersemar, yakni tepatnya sehari setelah dikeluarkannya Supersemar, atau tanggal 12 Maret 1966. Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 yang secara dasar berisi tentang keputusan untuk melakukan pembubaran kepada PKI dan organisasi - organisasi yang terafiliasi dengan PKI.

Tak hanya itu, Soeharto kemudian melakukan penangkapan kepada 15 menteri yang pada periode ini menduduki kabinet Dwikora pada tanggal 18 Maret 1966. Penangkapan menteri - menteri kabinet Dwikora ini dilakukan dengan alasan untuk menumpas unsur - unsur komunis (mengingat bahwa kabinet Dwikora didominasi oleh komunisme pada saat itu) dan memperkuat kekuasaan militer dibawah kepemimpinannya¹.

Terjadinya peristiwa - peristiwa yang telah disebutkan, yakni pembubaran PKI serta penangkapan 15 menteri dibawah kabinet Dwikora, memiliki implikasi yang negatif, terutama jika berbicara mengenai Soekarno yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno, yang sebelumnya telah mengizinkan Soeharto untuk mengambil langkah - langkah strategis, diyakini memiliki rasa ketidakpuasan yang begitu signifikan terhadap Soeharto. Hal ini dikarenakan, Supersemar yang dikeluarkan oleh Soekarno, memiliki maksud hanya sebagai sebuah langkah teknis yang diberikan untuk mengamankan negara, namun, Soeharto dianggap menggunakan kekuasaan dari Supersemar tersebut untuk mengambil langkah politik yang drastis.

Semenjak saat itu, Soekarno selaku Presiden RI merasa bahwa ada anomali - anomali yang terdapat dalam langkah - langkah (khususnya langkah - langkah politik) yang dikeluarkan oleh Soeharto dengan pemberian kekuasaan melalui Supersemar. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Soekarno yang kemudian dikenal dengan Supertasmar atau Surat Perintah 13 Maret yang dikeluarkan tepat dua hari setelah Supersemar. Surat ini secara dasar ditujukan dengan maksud untuk memperingati Soeharto agar tidak melangkahi wewenang Soekarno sebagai Presiden RI².

Namun, meskipun telah beberapa kali diberi peringatan oleh Soekarno, Soeharto yang merasa memiliki kekuasaan setelah Supersemar pun merasa bahwa semua langkah - langkah pengamanan yang diambilnya merupakan tanggungjawab pribadinya, dan tidak sepatasnya diintervensi oleh Soekarno, meskipun menjabat sebagai Presiden RI.

Karena peristiwa - peristiwa berlarut - larut ini, timbul konflik antara pihak Ir. Soekarno dan Letjen Soeharto yang kemudian berpusat pada kekuasaan politik di Indonesia serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia pasca - Supersemar yang berujung kepada stabilitas politik pada masa peralihan / transformasi legitimasi kekuasaan antara Pemerintahan Soekarno (Orde Lama) ke pemerintahan Orde Baru, yang kemudian dipimpin oleh Soeharto.

Jika membahas mengenai stabilitas politik, Samuel P. Huntington (1993) berargumen bahwa konflik global pasca-Perang Dingin akan lebih banyak dipicu oleh perbedaan budaya dan peradaban daripada ideologi atau ekonomi. Huntington menyatakan bahwa meskipun negara-bangsa tetap menjadi aktor utama, sumber utama konflik akan muncul di garis batas antarperadaban, seperti secara global, Barat, Islam, dan Konfusianisme. Tatanan dunia baru ini ditandai oleh interaksi antarperadaban, di mana masyarakat non-Barat semakin aktif membentuk sejarah, bukan lagi sekadar objek pengaruh Barat. Ia melihat pergeseran ini sebagai babak baru dalam evolusi konflik dunia.

Huntington juga kembali mendefinisikan peradaban sebagai kelompok budaya terluas, yang dibedakan oleh agama, bahasa, dan sejarah bersama. Peradaban-peradaban ini, seperti Islam, Barat, dan Konfusianisme, menunjukkan perbedaan mendasar yang memengaruhi pandangan dunia dan interaksinya. Interaksi yang semakin intensif antarperadaban memperkuat kesadaran akan perbedaan ini, yang sering kali memicu ketegangan. Modernisasi ekonomi dan kebangkitan agama juga memperkuat identitas peradaban, terutama saat identitas nasional tradisional melemah. Huntington menyoroti bahwa perbedaan budaya lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan dengan perbedaan politik atau ekonomi, sehingga memicu konflik yang lebih tajam dan berkepanjangan.

Huntington juga membahas "negara sobek" seperti Turki dan Meksiko, yang memiliki karakteristik dari beberapa peradaban dan menghadapi tantangan dalam menentukan identitasnya. Dalam pandangannya, interaksi masa depan dalam politik global akan berpusat pada hubungan antara "Barat dan yang lainnya," dengan Barat yang perlu memperkuat persatuan internalnya, menjalin hubungan kerja sama dengan peradaban lain, dan memahami perbedaan budaya untuk menghadapi

1 Adryamarthanino, V., Nailufar, N., N. (2022). Ketika Soeharto Menangkap 15 Menteri Loyalis Soekarno. *Detik*. Retrieved from : <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/27/100000479/ketika-soeharto-menangkap-15-menteri-loyalis-soekarno->

2 Retaduari, E. (2022). Mengingat Cerita Supertasmar, Surat Bantahan Bung Karno Terhadap Supersemar yang Tak Didengar. *Detik*. Retrieved from : <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/13/06300041/mengingat-cerita-supertasmar-surat-bantahan-bung-karno-terhadap-supersemar?page=all>

dunia multipolar. Huntington menekankan bahwa meskipun peradaban universal mungkin tidak dapat tercapai, koeksistensi antarperadaban yang beragam menjadi kunci stabilitas global, tak terkecuali di jika membahas di kancah nasional di negara - negara seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Menurut Sarwono (2006), studi literatur merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi seperti buku dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dengan tujuan untuk memperoleh dasar teori terkait topik yang sedang diteliti. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian pustaka, yang fokus utamanya adalah mengumpulkan artikel, jurnal, dan referensi lainnya dari perpustakaan tanpa melibatkan penelitian lapangan. Sumber data dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal nasional, portal berita daring, serta artikel publikasi online yang memiliki tema sejenis. Dalam menganalisis data, penelitian ini mengadopsi model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010), yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari artikel ilmiah dan jurnal yang relevan digunakan untuk memahami orientasi ideologi dan posisi Indonesia sebagai counter-hegemony. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis secara mendalam, kritis, dan sistematis, lalu disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Supersemar menjadi titik kritis dalam sejarah politik Indonesia, menandai berakhirnya Orde Lama di bawah Soekarno dan lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Dalam konteks teori stabilitas politik Samuel P. Huntington, peralihan kekuasaan ini mencerminkan dinamika yang kompleks antara kebutuhan akan ketertiban dan tantangan dari partisipasi politik yang meluas. Huntington berpendapat bahwa stabilitas politik memerlukan institusi yang kuat sekaligus kemampuan untuk mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat. Namun, masa Orde Lama ditandai oleh ketidakseimbangan ini, dengan kelemahan institusional dan dominasi kepemimpinan personal Soekarno yang akhirnya memicu ketidakstabilan.

Dalam perspektif Huntington, politik Orde Lama mencerminkan ketidakmampuan untuk menciptakan keseimbangan antara institusionalisasi dan partisipasi. Orde Lama terfragmentasi oleh konflik ideologis antara nasionalis, komunis, dan Islamis, serta kurangnya institusi yang mampu menyerap dinamika politik tersebut³. Supersemar, yang dimaksudkan sebagai solusi teknis untuk meredakan kekacauan, justru menjadi langkah awal menuju restrukturisasi kekuasaan yang lebih stabil di bawah Orde Baru. Tindakan Soeharto setelah menerima Supersemar, seperti pembubaran PKI dan penangkapan anggota kabinet Dwikora, menunjukkan respons militer yang kuat terhadap krisis politik dan keamanan.

Huntington menekankan bahwa stabilitas politik sering kali muncul dari penataan ulang institusional setelah masa krisis. Dalam kasus Indonesia, tindakan tegas Soeharto dapat dilihat sebagai upaya menciptakan tatanan politik yang lebih terpusat⁴. Namun, pendekatan ini juga membatasi partisipasi politik dengan meminggirkan kelompok-kelompok tertentu, seperti pendukung Soekarno dan simpatisan PKI. Jika meninjau dari pemikiran Huntington, stabilitas seperti ini dapat bertahan sementara, tetapi berisiko menciptakan ketegangan jangka panjang karena kurangnya legitimasi yang berasal dari dukungan masyarakat luas.

Transformasi kekuasaan ke Orde Baru mencerminkan fokus pada institusionalisasi kekuasaan melalui dominasi militer. Orde Baru di bawah Soeharto memperkenalkan struktur pemerintahan yang lebih terorganisir, tetapi dengan kontrol yang ketat terhadap oposisi⁵. Hal ini kemudian menunjukkan bagaimana penguatan institusi mengorbankan pluralisme politik. Stabilitas politik yang dihasilkan bersifat koersif, dengan membatasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang kemudian memperpanjang masa pemerintahan otoriter.

Mengingat bahwa legitimasi merupakan elemen yang penting dalam proses transformasi politik, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada awalnya diterima sebagai langkah untuk memulihkan stabilitas setelah kekacauan Orde Lama tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, alih - alih, legitimasi ini semakin memudar ketika Orde Baru gagal memenuhi tuntutan masyarakat untuk

3 Sukanto, A. (2013). Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik. *Indonesian Journal of Theology*, 1(1), 25-47. <https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90>

4 Setyowati, A. (2023). Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(4), 779-784.

5 Chafid, M., & Erliyana, A. (2021). Implikasi Ketatanegaraan Presidential Term Limit menurut Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum Amendemen terhadap Presidential Continuism Masa Orde Baru. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 129-154.

partisipasi yang lebih luas. Ketergantungan pada kekuatan militer dan pengendalian penuh oleh Soeharto menciptakan sistem yang kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan sosial-politik di kemudian hari.

Soeharto memanfaatkan Supersemar untuk membangun narasi stabilitas, tetapi dengan menekan berbagai kelompok yang berseberangan, termasuk kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil yang menginginkan demokrasi⁶. Huntington menjelaskan bahwa stabilitas politik tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga kemampuan sistem untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Dalam kasus Orde Baru, pengabaian terhadap partisipasi politik menciptakan celah yang pada akhirnya mengakibatkan krisis legitimasi yang meletus pada 1998.

Salah satu aspek penting dalam teori Huntington adalah kebutuhan akan reformasi institusional yang berbasis pada legitimasi dan keterlibatan masyarakat. Dalam kasus Indonesia, Orde Baru berusaha menggantikan kekacauan Orde Lama dengan tatanan yang lebih stabil. Namun, pendekatan sentralisasi kekuasaan tanpa keterlibatan masyarakat yang luas menyebabkan struktur pemerintahan yang rentan. Ketika krisis ekonomi melanda Asia pada 1998, kelemahan ini terungkap dan memicu runtuhnya rezim Soeharto⁷.

Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru mencerminkan dilema klasik yang kemudian dapat diidentifikasi seperti stabilitas politik yang sering kali dicapai melalui konsolidasi kekuasaan, tetapi tanpa legitimasi berbasis partisipasi, stabilitas ini tidak berkelanjutan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan otoriter mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi gagal menghadapi tantangan demokratisasi dan perubahan sosial. Hal ini membuktikan relevansi teori Huntington dalam memahami dinamika perubahan politik di negara-negara berkembang.

Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami reformasi politik yang lebih inklusif. Demokratisasi yang terjadi pasca-1998 menunjukkan pentingnya integrasi antara stabilitas dan partisipasi yang diabaikan oleh Orde Baru. Dalam pandangan Huntington, ini adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan. Sistem demokrasi yang berkembang pasca-Orde Baru mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan masyarakat yang semakin plural dan kompleks.

SIMPULAN

Supersemar menandai peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang dalam kerangka teori Huntington menggambarkan dinamika antara kebutuhan ketertiban dan tantangan partisipasi politik. Huntington menekankan bahwa stabilitas politik memerlukan institusi yang kuat dan kemampuan mengakomodasi berbagai kelompok. Orde Lama gagal mencapainya, dengan konflik ideologis yang terfragmentasi dan kelemahan institusional, yang memicu ketidakstabilan. Supersemar, meskipun dimaksudkan untuk meredakan kekacauan, justru memicu restrukturisasi kekuasaan yang lebih terpusat di bawah Soeharto. Tindakan tegas Soeharto, seperti pembubaran PKI dan penangkapan anggota kabinet, menciptakan stabilitas sementara, namun membatasi partisipasi politik dan mengurangi legitimasi jangka panjang. Teori Huntington menjelaskan bahwa stabilitas yang tercapai melalui konsolidasi kekuasaan militer, meskipun efektif sementara, tidak menciptakan legitimasi yang berkelanjutan tanpa partisipasi masyarakat. Orde Baru mengutamakan penguatan institusi militer dan kontrol terhadap oposisi, namun mengabaikan pluralisme dan partisipasi politik. Ketidaklegitimasiannya semakin terlihat seiring berjalannya waktu, dengan Soeharto menekan kelompok yang menginginkan demokrasi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa stabilitas politik harus melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat bertahan lama, seperti yang tercermin dalam proses reformasi pasca-1998 yang mendorong transisi menuju demokrasi yang lebih inklusif.

REFERENSI

- Aprilia, L. E., & Swastika, K. (2014). Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998.
- Adryamarthanino, V., Nailufar, N., N. (2022). Ketika Soeharto Menangkap 15 Menteri Loyalis Soekarno. *Detik*. Retrieved from : <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/27/100000479/ketika-soeharto-menangkap-15-menteri-loyalis-soekarno->
- Chafid, M., & Erliyana, A. (2021). Implikasi Ketatanegaraan Presidential Term Limit menurut Pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum Amendemen terhadap Presidential Continuism Masa Orde Baru. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 129-154.
- Firdausi, F. (2019). Ketika Soeharto Menangkap Menteri-Menteri Loyalis Soekarno. *Tirto*. Retrieved from : <https://tirto.id/ketika-soeharto-menangkap-menteri-menteri-loyalis-soekarno-djvF>

⁶ Ibid.

⁷ Aprilia, L. E., & Swastika, K. (2014). Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998.

- Mirzu. (2022). Kilas Sejarah: Pembubaran PKI dan Berangnya Presiden Soekarno. *Nukilan*. Retrieved from : <https://nukilan.id/kilas-sejarah-soeharto-pembubaran-pki-dan-berangnya-presiden-soekarno/>
- Retaduari, E. (2022). Mengingat Cerita Supertasmar, Surat Bantahan Bung Karno Terhadap Supersemar yang Tak Didengar. *Detik*. Retrieved from : <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/13/06300041/mengingat-cerita-supertasmar-surat-bantahan-bung-karno-terhadap-supersemar?page=all>
- Samuel, H. (1993). The clash of civilizations. *Foreign Affairs*, 72(3), 22-49.
- Setyowati, A. (2023). Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(4), 779-784.
- Sugiyono, P. D. (2010). Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Sukanto, A. (2013). Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik. *Indonesian Journal of Theology*, 1(1), 25-47. <https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90>